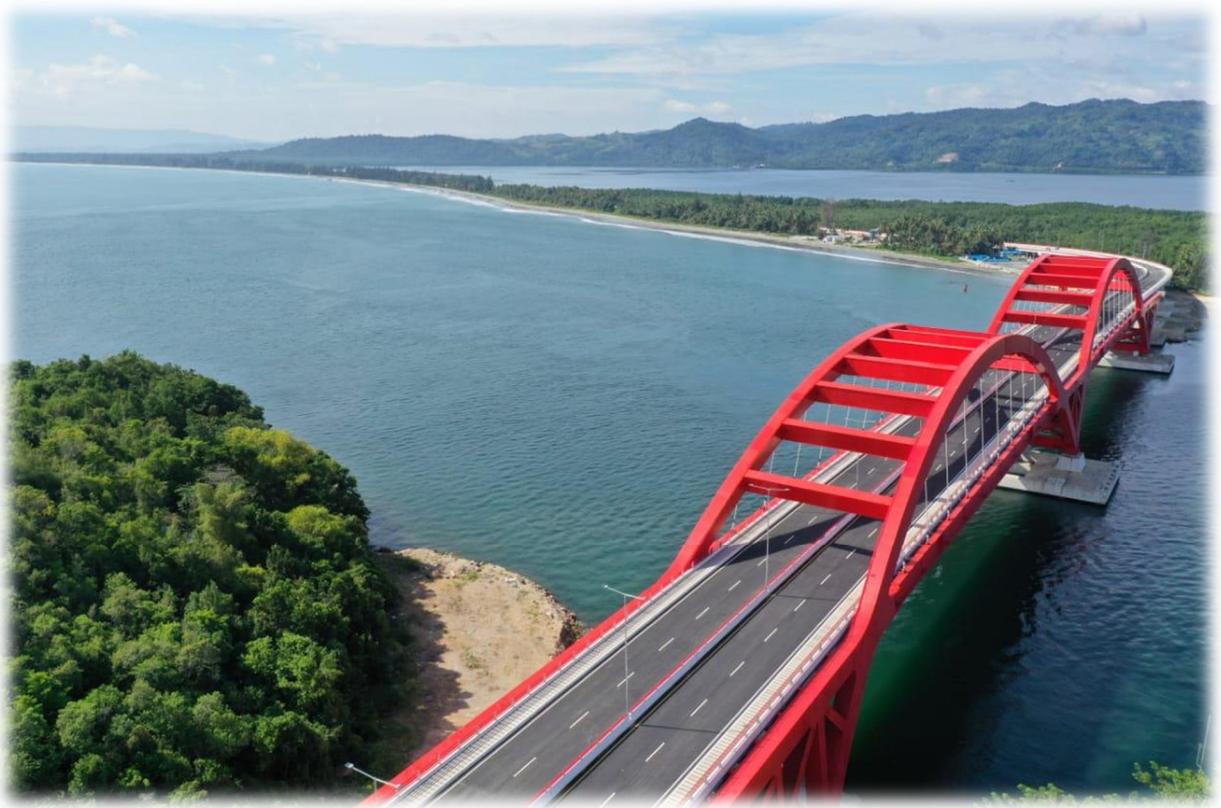




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA JAYAPURA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan KaruniaNya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jayapura Tahun 2023 dapat disusun sebagai pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah (OPD). Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi OPD dalam mencapai sasaran dan tujuan yang dicapai.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jayapura Tahun 2023 berisi Informasi dan Rencana Kerja Sasaran dan Tujuan yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura (DPA dan DPPA Tahun 2023).

Disadari bahwa apa yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura Tahun 2023 masih banyak kekurangan, namun dengan dukungan sumber daya yang tersedia diupayakan pencapaian kinerja akan dapat ditingkatkan.

Jayapura, 07 Februari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA JAYAPURA



Drs. BINTON NAINGGOLAN

Pembina utama Muda

NIP 196506181989031018

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambar Umum Organisasi	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi	3
1.1.2 Uraian Tugas	3
1.2 Permasalahan Utama Yang Dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.1.1 Strategi dan Kebijakan	12
2.2 Program dan Kegiatan	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja.....	29

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jayapura menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura melaksanakan 4 Program Kerja yang dijabarkan dalam 10 Kegiatan dengan 18 Sub Kegiatan dengan Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja yang berbeda.

Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura memperoleh alokasi Anggaran dengan Total Anggaran sebesar Rp. 5.092.719.048,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 4.835.035.084,-

Disadari bersama bahwa tugas dan fungsi yang diemban Pemerintah Kota Jayapura terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura ditahun 2023 guna mendukung program dan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, sehingga bisa terlaksana dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan harapan agar dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan diharapkan. Namun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura selalu berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan Tugas Pokok dengan sebaik- baiknya demi terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Jayapura yang telah ditetapkan.

Dengan demikian ikhtisar eksklusif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura Tahun 2023 disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah Kota Jayapura.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura:

- a. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	13 Orang
2	Perempuan	11 Orang
	Jumlah	24 Orang

- b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	4 Orang
2	Strata Satu (S1)	15 Orang
3	Diploma (D3)	3 Orang
4	SLTA	2 Orang
	Jumlah	24 Orang

- c. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	14 Orang
3	Golongan II	5 Orang
	Jumlah	24 Orang

- d. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	10 Orang
4	Staf	9 Orang
	Jumlah	24 Orang

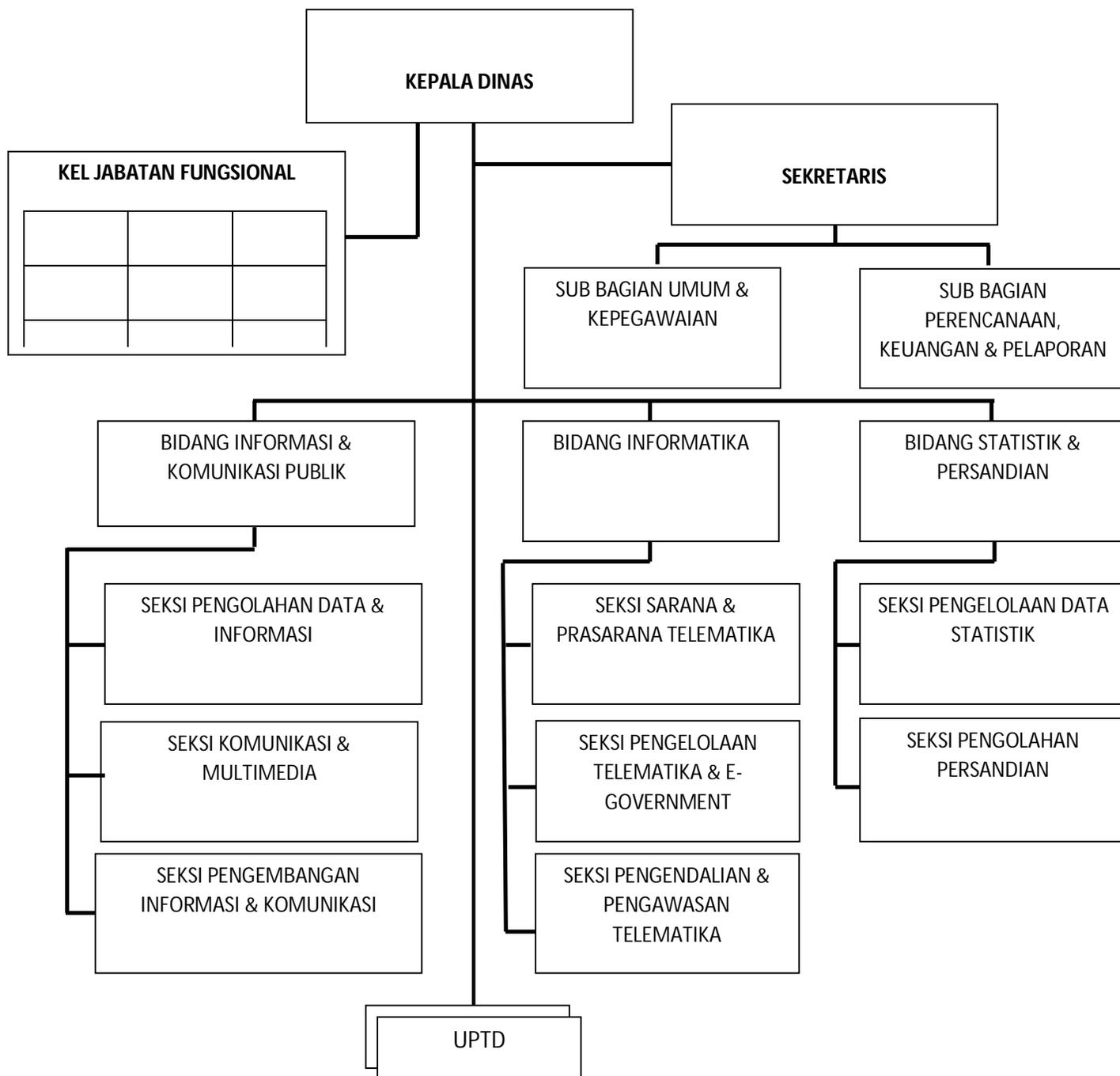
- e. Komposisi Staf IT (Tenaga Kontrak) sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah
1	Laki-Laki	3 Orang
2	Perempuan	1 Orang
	Jumlah	4 Orang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA, TIPE B TAHUN 2018

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 DESEMBER 2016



1.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura mempunyai Tugas Pokok:

- Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Statistik Berdasarkan Asas Otonomi dan Tentang Pembantuan.

B. Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Persandian dan Statistik;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan system informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer antara bidang/opd, pengelola informasi dan publikasi, pengelolaan dan pengembangan komunikasi publik, pengembangan dan pengelolaan data statistik, pengembangan dan pengelolaan persandian;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh walikota.

1.1.2 URAIAN TUGAS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat mempunyai tugas

1). Sekretaris

Tugas:

Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset, perencanaan dan pelaporan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan rencana kerja dinas;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan program, yang meliputi:
 - Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan dinas;

- Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum lainnya;
- d. Pelaksanaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3). Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Tugas:

Menyusun rencana dan pelaporan, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan dinas dan melaksanakan keuangan dan asset meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan dan asset.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyusunan program dan rencana kinerja Dinas;
- c. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Penyusunan dan pengendalian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK);
- e. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- g. Penyusunan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- k. Penyusunan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika.
- l. Pelaksanaan administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung dan administrasi asset;
- m. Pelaksanaan tertib pembukuan pengelolaan keuangan dan asset;

- n. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan asset Dinas;
- o. Penyusunan Laporan Tahunan, Renja;
- p. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

B. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas;

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas Lingkup Informasi dan Komunikasi Publik.

Fungsi:

- Perencanaan dan Penyusunan Program Lingkup Pengelolaan Data Informasi, Komunikasi dan Multimedia serta pengembangan informasi dan komunikasi;
- Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengelolaan data informasi, komunikasi dan multimedia serta pengembangan informasi dan komunikasi;
- Pelaksanaan Lingkup Pengelolaan Data Informasi, Komunikasi dan Multimedia serta pengembangan informasi dan komunikasi; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan data informasi, komunikasi dan multimedia serta pengembangan informasi dan komunikasi.
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

Bidang ini meliputi:

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas Lingkup Informasi dan Komunikasi Publik.

Fungsi:

- a. Pengumpulan dan Penganalisaan data lingkup Pengelolaan Data dan Informasi;
- b. Penyiapan bahan petunjuk Teknis Lingkup Pengelolaan Data dan Informasi;
- c. Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik yang meliputi data dan informasi pengaduan masyarakat baik dari media elektronik dan cetak serta tatap muka;
- d. Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan Nasional serta Daerah; dan
- e. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Lingkup Pengelolaan Data dan Informasi.

2. Seksi Komunikasi dan Multi Media

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Lingkup Komunikasi dan Multimedia.

Fungsi:

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup komunikasi dan multimedia;

- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup komunikasi dan multimedia;
 - c. Pelaksanaan komunikasi dan multimedia yang meliputi, menghimpun dan menganalisa data yang diarsipkan, diimplementasikan serta disosialisasikan dalam bentuk multimedia, dan penerbitan media cetak serta penyelenggaraan media interaktif;
 - d. Penyediaan konten lintas sektoral; dan
 - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Komunikasi dan Multimedia.
3. Seksi Pengembangan Informasi dan Komunikasi

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik lingkup pengembangan informasi dan komunikasi.

Fungsi:

- a. Pengumpulan dan penganalisan data lingkup pengembangan informasi dan komunikasi;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan informasi dan komunikasi.
- c. Pelaksanaan lingkup pelayanan informasi dan layanan hubungan media serta pengembangannya; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan informasi dan komunikasi.

C. *Bidang Informatika*

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas Lingkup Informatika.

Fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program lingkup sarana dan prasarana telematika serta e-government dan pemberdayaan telematika;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana telematika serta e-government dan pemberdayaan telematika;
- Pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telematika serta e-government dan pemberdayaan telematika; dan
- Monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telematika serta e-government dan pemberdayaan telematika.

Bidang ini meliputi:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang telematika lingkup sarana dan prasarana telematika.

Fungsi:

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup sarana dan prasarana telematika;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana telematika;
- c. Pelaksanaan sarana dan prasarana pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pengembangan teknologi informasi serta rekomendasi mutu informasi, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan interkoneksi data serta penyusunan database, penyusunan;
- d. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Detail pengembangan teknologi informasi daerah serta pengkajian dan kerjasama teknik lingkup teknologi informasi;
- e. Pengelolaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi;
- f. Pengelolaan layanan akses internet dan intranet; dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telematika.

2. Seksi Pengelolaan Telematika dan E-Government

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Informatika lingkup Pengelolaan Telematika & E-Government

Fungsi:

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup e-government dan pemberdayaan telematika;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup e-government dan pemberdayaan telematika;
- c. Pelaksanaan lingkup e-government dan pemberdayaan telematika yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pembangunan teknologi informasi serta perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan terkoneksi;
- d. Pengelolaan layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- e. Pengelolaan aplikasi komunikasi, spesifik dan suplemen yang terintegrasi serta pengembangannya;
- f. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah;
- g. Pengelolaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan dan kegiatan daerah; dan
- h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup e-government dan pemberdayaan telematika.

3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Telematika

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Informatika Lingkup Pengendalian dan Pengawasan Telematika.

Fungsi:

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian dan pengawasan telematika;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan pengawasan telematika;
- c. Pelaksanaan lingkup pengendalian dan pengawasan telematika;
- d. Pengelolaan layanan keamanan informasi e-Government;
- e. Pengelolaan komunikasi intra Pemerintah;
- f. Pengelolaan integrasi layanan komunikasi dan pemerintahan;
- g. Pengelolaan penyelenggaraan ekosistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Smart City;
- h. Pengembangan sumber daya TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Pemerintah dan masyarakat; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian dan pengawasan telematika.

D. Bidang Statistik dan Persandian

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas Lingkup Statistik dan Persandian.

Fungsi:

- Perencanaan dan penyusunan program lingkup pengelolaan data statistik dan persandian;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengelolaan data statistik dan persandian;
- Pelaksanaan lingkup pengelolaan data statistik dan persandian; dan
- Monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan data statistik dan persandian.

Bidang ini meliputi;

1. Seksi Pengelolaan Data Statistik

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Fungsi:

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengelolaan data statistik dan dokumentasi pembangunan;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan data statistik dan dokumentasi pembangunan;
- c. Pelaksanaan lingkup pengelolaan data statistik dan dokumentasi pembangunan;

- d. Menyusun dan memelihara data statistik hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan serta mempersiapkan peragaan hasil pembangunan; dan
 - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan data statistik.
2. Seksi Pengelolaan Persandian

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Fungsi:

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengelolaan persandian;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan persandian;
- c. Pelaksanaan lingkup pengelolaan persandian;
- d. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah.;
- f. Pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan perbaikan terhadap operasional komunikasi sandi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- g. Pengamanan terhadap kegiatan/operasional/fasilitas/instansi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya serta pengamanan informasi elektronik;
- h. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional persandian; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan persandian.

E. Unit Pelaksana Teknis

Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja UPT pada Dinas akan diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota tersendiri.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional pada dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kepala dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

1.2 PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura meliputi beberapa hal yaitu:

- A. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:
 - a. Faktor pendanaan yang masih kurang sehingga tidak mendukung kapasitas

bandwidth Dinas Komunikasi dan Informatika yang sangat terbatas dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura masih harus mensupport jaringan OPD lain atau beberapa OPD untuk pelayanan jaringan.

- b. Faktor personil/tenaga (SDM) baik staf ASN maupun Tenaga IT, Security Jaringan dan Tenaga Statistik Persandian yang masih minim/kurang serta keterbatasan ASN yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang diduduki sehingga pengetahuan akan bidang yang diduduki akan lebih mendalam dan mengerti tupoksi tersebut.
 - c. Kurangnya kualitas SDM untuk dalam memperkuat fungsi dan tugas pokok bidang dalam hal ini Bimtek-bimtek SDM di bidang Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi serta Bidang Statistik dan Persandian.
- B. Isu-Isu tingkat Lokal Kota Jayapura pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura adalah:
- a. Belum efektifnya saluran komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - b. Lambatnya penanganan terhadap akses internet.
 - c. Belum meratanya jaringan akses komunikasi dan internet.
 - d. Penerapan E-Government belum optimal dan maksimal.
 - e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan perlengkapan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan call center (112).
 - f. Belum maksimalnya Smart City / Kota Cerdas.
 - g. Kurangnya tenaga SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten.
 - h. Perencanaan atau blue print pengembangan TIK.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura, menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dimana di tahun 2023 merupakan tahun dimana masuk pada masa penyusunan Renstra Transisi yaitu tahun 2023 – 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada rencana strategis yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jayapura.

PERNYATAAN VISI

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi itu selanjutnya. Visi adalah cara pandang suatu kedepan kemana instansi atau organisasi Pemerintah harus dibawah, agar selalu eksis, penuh inovatif. Visi juga merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi atau Organisasi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Visi Kota Jayapura adalah “BUDAYA BERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA JAYAPURA”.

Yang terdiri dari:

1. Tertib Administrasi;
2. Tertib Aturan;
3. Pelayanan Prima;
4. Inovasi dan Perubahan;
5. Bebas Korupsi;
6. Opini wajar tanpa pengecualian.

MISI KOTA JAYAPURA

Misi Kota Jayapura adalah:

1. Terwujudnya masyarakat yang agamis, berbudaya dan beradab;
2. Terwujudnya Kota Jayapura yang bersih, indah, lestari, aman dan nyaman;
3. Terwujudnya Kota Jayapura sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa;
4. Terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik;

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Jayapura tersebut dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura mengacu pada Visi yang ketiga yaitu pelayanan prima dengan tujuan meningkatkan pembangunan tata pemerintahan yang baik. Dengan sasaran meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Dimana strategi yang dilakukan yaitu meningkatkan Sistem Pelayanan Publik, dengan arah kebijakan adalah meningkatkan manajemen pelayanan publik.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: " <u>BUDAYA BERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA JAYAPURA</u> "			
Misi IV: Terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan
Terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik	Terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik	Terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik	Terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik

2.1.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Adapun Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura yaitu belum memadainya implementasi Tata Pemerintahan Yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Jayapura dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura memiliki strategi untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Misi tersebut yaitu:

1. Terselenggaranya sistem Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien;
2. Terbangunnya kerja sama yang baik dengan setiap instansi terkait di Kota Jayapura sehingga dapat bersinerjik di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Pembinaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan system informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer antar Bidang/OPD), pengelolaan produksi informasi dan publikasi, pengelolaan dan pengembangan komunikasi publik, Persandian dan statistik dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Optimalisasi Jaringan untuk Content Agama;
4. Meningkatkan kualitas layanan pendataan kependudukan melalui kualitas sistem informasi kependudukan.;
5. Optimalisasi layanan publik berbasis teknologi informasi.;
6. Terciptanya Penerapan ITK memonitor pelaksanaan RT RW;
7. Terciptanya Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan pelayan masyarakat;
8. Terciptanya Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
9. Terciptanya Penyediaan utilitas kepariwisataan;
10. Terciptanya Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
11. Terciptanya Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Stake Holder Berbasis ITK;
12. Terciptanya Konektivitas Jaringan yang berkualitas;
13. Terciptanya Mengangkat Keunggulan Geografi Kampung secara Literasi Digital.

KEBIJAKAN

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan Penyediaan Perencanaan Pengembangan TIK:

1. Memberikan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang berbasis teknologi;
2. Peningkatan Kualitas SDM ASN Pelayanan Publik Berbasis TIK;
3. Peningkatan Security Sarana dan Prasarana TIK Pemda;
4. Penyediaan sumber daya outsourcing dalam pelaksanaan teknologi informasi;
5. Pengembangan sistem teknologi informasi layanan publik;
6. Penataan layanan keamanan dan akses internet taman;
7. Mencegah Pelanggaran Dokumen RT RW;
8. Layanan Respon Cepat Penegakan KAMTIBMAS berbasis TIK;
9. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi di dunia pendidikan;
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pendidik yang berbasis teknologi;
11. Pengawasan dan pengendalian penggunaan layanan teknologi informasi oleh peserta didik;
12. Peningkatan Respon pelayanan PUSKESMAS dan PUSTU Berbasis TIK;
13. Penyediaan sarana konsultasi bagi orang tua atau keluarga.
14. Penyediaan Informasi Layak Anak;
15. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang mendukung informasi Bisnis;
16. Peningkatan sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pembelajaran;
17. Penyediaan Data dan Informasi Pariwisata yang Valid dan Lengkap;
18. Pengembangan jaringan promosi dan kerjasama pada level regional, nasional, dan internasional dan memanfaatkan TIK;
19. Mendorong penerapan manajemen database pembangunan dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah;
20. Peningkatan Peran PPID dalam Keterbukaan Informasi dan komunikasi;
21. Penyediaan kemudahan akses internet yg sehat di masyarakat;
22. Integrasi Informasi tentang Pelayanan Stake Holder berbasis TIK;
23. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika;
24. Memperkuat kelembagaan dan kelengkapan struktur organisasi yang didasarkan pada peraturan dan kebutuhan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
25. Peningkatan Bandwidth Pelayanan Publik;
26. Peningkatan pemanfaatan taman kota menjadi pusat pembelajaran;
27. Literasi Digital Keunggulan Kampung;

28. Meningkatkan efektifitas koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika;
29. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Komunikasi dan Informatika dengan lebih transparan dan akuntabel;
30. Meningkatkan tertib administrasi kepegawaian yang didukung sistem yang terintegrasi.

2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura yang dilaksanakan sesuai dengan Program Prioritas Nasional, yang meliputi:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan Kegiatan terdiri dari:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (2) Penyediaan Bahan Logistik
 - (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - (5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 - (1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dengan Kegiatan terdiri dari:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:

- (1) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- (2) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Dengan Kegiatan terdiri dari:

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- (1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- (1) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- (2) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- (3) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Dengan Kegiatan terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- (1) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dengan Kegiatan terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- (1) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan OPD yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan dan sub kegiatan dalam dinas akan lebih baik, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD dan RPJPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura Tahun 2023 - 2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura Tahun 2023.

RENCANA KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	IKM	Persen	100%
2	Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	Persen	100%
3	Meningkatnya Penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persen	100%
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentasi OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100%
5	Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	100%

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

RINGKASAN PENETAPAN KINERJA DINAS KOMINFO TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	IKM	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.804.043.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.590.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.048.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.500.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.928.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.023.600
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.485.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.357.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.268.000
2	Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	100%		
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	223.399.968
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	370.567.800
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	223.174.400
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	263.540.680

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	100%		
				Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	167.736.000
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	124.264.000
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentasi OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	140.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.657.200

2.3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia melalui terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Kinerja atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dimana untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan agar menjadi lebih baik dan berorientasi hasil, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut :

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA
TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IKM	Persen	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	Persen	100%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persen	100%
4	Persentasi OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100%
5	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (Performance Gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (Performance Improvement).

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam Skala pengukuran Ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksana evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

PERSENTASE	PREDIKAT	KODE WARNA
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Terlampai Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

No.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
1.	Sangat Baik	> 90.00
2.	Baik	75.00 – 89.99
3.	Cukup	65.00 – 74.99
4.	Kurang	50.00 – 64.99
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99

PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023

No	KATEGORI	RATA – RATA % CAPAIAN
1.	Sangat Baik	> 90.00
2.	Baik	75.00 – 89.00
3.	Cukup	65.00 – 74.99
4.	Kurang	50.00 – 64.99
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99

1). **Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

a. *Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023*

**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	IKM	100%	90,65%	90,65%
2	Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	100%	95,19%	95,2%
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentasi OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
5	Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	35,50%	35,50%

Analisis Pencapaian Kinerja :

Dilihat dari Tabel tersebut bahwa perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura hanya mencapai 84,27 % yaitu dengan pengukuran capaian nilai **Baik**.

Dimana dari 5 indikator utama dengan jumlah total target 500 sedangkan yang terealisasi hanya 421,35 sehingga yang mencapai 100% hanya 2 indikator saja. Hal ini

disebabkan karena pada Bidang Persandian tidak adanya atau kurangnya Ahli Sandi (Sandiman) yang berkompeten sehingga tidak bisa mengakses terkait keamanan persandian dan informasi Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan penambahan Ahli Sandi (Sandiman). Dimana ada 2 sub kegiatan ada yang tidak bisa mencapai target 100% dan hanya bisa mencapai 90,65% dan 95,2%.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kerja sasaran diatas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura Tahun 2023 pada setiap sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Jumlah Indikator	Rata-Rata % Capaian	Sangat Kurang 0 – 49,99	Kurang 50,00 – 64,99	Cukup 65,00 – 74,99	Baik 75,00 – 89,99	Sangat Baik > 90,00
MISI 2								
1	IKM	100%	90,65%					Sangat baik
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	100%	100%					Sangat baik
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	100%	95,2%					Sangat baik
4	Persentasi OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%					Sangat baik
5	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	35,50%	Sangat Kurang				

**TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PREDIKAT	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Baik	> 90.00	0
2	Baik	75.00 – 89.99	421
3	Cukup	65.00 – 74.99	0
4	Kurang	50.00 – 64.99	0
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	0
Jumlah			421

(1) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

**TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Realisasi Target	
				Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	IKM	100%	75%	90,65%
2	Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	100%	41%	100%
3	Meningkatnya Penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	100%	94%	95,2%
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	98%	100%
5	Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	0%	35,50%

(2) *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir periode Renstra*

**TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN
AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA JAYAPURA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	IKM	100%	90,65%	90,65%
2	Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	100%	95,2%	95,2%
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentasi OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
5	Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	35,50%	35,50%

(3) *Efisiensi Penggunaan Sumberdaya*

**TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA JAYAPURA**

No.	SASARAN STRATEGIS (Outcome)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (output)	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	IKM	100%	90,65%	90,65%

No.	SASARAN STRATEGIS (Outcome)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (output)	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	100%	95,2%	95,2%
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	98%	100%	100%
5	Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	35,50%	35,50%

(4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

TABEL ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN KEGAGALAN/PENURUNAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi	ANALISA PENYEBAB		
					(Keberhasilan/ Peningkatan)	(Kegagalan/ Penurunan Kinerja)	(Solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	IKM	100%	90,65%	• Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		
2	Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	100%	100%	• Adanya peningkatan jumlah masyarakat publik dalam melakukan dan mengakses pelayanan secara online		

3	Meningkatnya Penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	100%	95,2%	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengetahui informasi-informasi serta mengetahui terkait kebijakan dan program Pemerintah Daerah 		
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengguna Data Statistik oleh OPD2 didalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 		
5	Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	35,50%	<ul style="list-style-type: none"> Terjaganya keamanan informasi Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya pengganti Sandiman (Ahli Sandi) di mana di OPD hanya ada 1 orang Ahli Sandi (Sandiman) dan sudah meninggal sehingga harus perlu disekolahkan lagi, tetapi dari Badan Siber belum dibuka sekolah tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Menambah Ahli Sandi (Sandiman) dan disekolahkan sesuai Bidang tersebut, supaya bisa ada yang menangani penanganan terkait keamanan Informasi Pemerintah Daerah

(5) *Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja*

**TABEL ANALISIS PPROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi	PROGRAM / KEGIATAN	
					PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	IKM	100%	90,65%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	100%	100%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	100%	95,19%	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
5	Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	35,50%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan.

KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA:

1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan;
2. Adanya Koordinasi yang Baik dengan Instansi terkait baik di tingkat kabupaten / Kota, Provinsi dan tingkat Nasional;
3. Adanya Komitmen bersama seluruh ASN Dinas Komunikasi dan Informatika untuk bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan (khususnya pelayanan di bidang IT).

4.2 LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura Dalam Pelayanan dibidang Komunikasi dan Informatika ada beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian antara lain:

1. Menambah pegawai dalam Dinas sehingga mempermudah dalam mengerjakan tugas-tugas kantor baik di masing-masing bidang;
2. Meningkatkan SDM terutama Bidang IT dan Persandian sehingga SDM yang ada berkualitas dan berkompeten dalam bekerja di bidang Informatika
3. Menggunakan Infrastruktur (peralatan kerja) yang yang ada semaksimal mungkin dan menambah peralatan kerja seperti Laptop, Komputer dan lain-lainnya terutama dalam bidang IT guna untuk mendukung didalam bekerja.
4. Menambah jumlah Anggaran agar dapat menjalankan semua program dan kegiatan dalam Dinas karena masih ada beberapa program yang belum bisa terealisasi sehingga bisa maksimal dalam menjalankan program dan kegiatan dan lain-lain.

Demikian laporan kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023 ini disusun.

Kiranya dapat menjadi media evaluasi untuk perbaikan yang berkesinambungan.

Jayapura, 07 Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA JAYAPURA**



Drs. BINTON NAINGGOLAN

Pembina utama Muda

NIP 196506181989031018



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Balai Kota Nomor 1 Entrop Gedung Otonom Lantai III Telp (0967) – 522245 Kode Pos 99224
e-mail : kominfo@jayapurakota.go.id, website : kominfo.jayapurakota.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA JAYAPURA

NOMOR : 051/041/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KENERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/ 09/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN No. PER/ 20/ M.PAN/ 11/ 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dalam rangka peningkatan Akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dengan:

- a. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang pendek dari tujuan.
- b. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
- c. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
- d. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program kebijakan.
- e. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

PASAL 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB III
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PASAL 4

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura mengacu pada indikator kinerja utama pemerintah Kota Jayapura dan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2026.

PASAL 5

Pemeliharaan dan penetapan indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PASAL 7

Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura digunakan untuk:

- a. Perencanaan tahunan;
- b. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. Evaluasi kinerja;
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura.

BAB V

PEMBINAAN

PASAL 8

Pembinaan atas pelaksanaan penetapan indikator kinerja utama dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PENUTUP

PASAL 9

Dengan adanya keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura tentang indikator kinerja utama ini maka setiap unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menggunakan indikator kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kerja secara baik.

Jayapura, 11 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA JAYAPURA**



Drs. BINTON NAINGGOLAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650618 198903 1 018

Lampiran : 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA

NOMOR : 051/041/TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA

1	INSTANSI	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura
2	MISI	:	Terwujudnya kota informatif menuju E-Government serta masyarakat berbudaya informasi dan komunikasi
3	TUGAS	:	Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Statistik berdasarkan Asas Otonomi dan tentang pembantuan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Jayapura
4	FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Statistik. Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan jaringan sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer antar OPD, pengelolaan, dan pengembangan komunikasi publik, pengembangan dan pengelolaan data statistik, pengembangan dan pengelolaan persandian. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dinas. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi/Alasan/Perhitungan
Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM	Persentase layanan publik yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informasi
Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Program Aplikasi Informatika	Presentasi Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen data aplikasi organisasi perangkat daerah dan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di pemerintah daerah, - Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi/Alasan/Perhitungan
Meningkatnya penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program pemerintah daerah	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Daftar Informasi Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelayanan keterbukaan informasi pemerintah daerah, - Jumlah mitra pemangku kepentingan sebagai media penyebaran informasi kebijakan dan program pemerintah daerah
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	
Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<p>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah,</p> <p>Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah</p>	Jumlah Dokumen Statistik sektoral yang tersedia
Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memiliki keamanan sistem informasi

Jayapura, 11 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA JAYAPURA**



Drs. BINTON NAINGGOLAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650618 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
(DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. BINTON NAINGGOLAN**
Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. FRANS PEKEY, M.Si**
Jabatan : **Pj. Walikota Jayapura**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 11 Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Drs. BINTON NAINGGOLAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19650618 198903 1 018

Pihak Kedua,

Pj. WALIKOTA JAYAPURA

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	IKM	100%
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Presentasi Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	100%
- Program Aplikasi Informatika		
Meningkatnya penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	100%
- Program Informasi Dan Komunikasi Publik		
Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	12 Bulan
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH)	30 Pasang
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang	3 Unit

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Liter	6450 Liter
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	4 Jenis
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksampler (Bulan)	12 Eksampler
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Orang	84 Orang/hari
	4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis layanan	6 Jenis
	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpeliharanya unit kendaraan operasional	5 Unit
	2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharanya sarana dan prasarana gedung / bangun kantor	1 gedung
2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah KIM dan PERTURA	50 KIM PERTURA
	2.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang berkompeten	5 Orang
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
	1.	Pegelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Astinet	12 Paket
	2.	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Jaringan Internet Government, Paket Zoom Meeting, Perawatan Videotron)	3 Layanan
	2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	60 Sumber Daya

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
		1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kegiatan	1 Kegiatan
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
		1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Persandian yang Berkompeten	3 Orang

Kegiatan		Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.804.043.000
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 28.590.000
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 44.048.000
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 64.500.000
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 13.928.000
6.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.000.000
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp 71.023.600
8.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 204.485.000
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 10.357.000
10.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.268.000
Program Informasi Dan Komunikasi Publik		
1.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp 167.736.000
2.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 124.264.000
Program Aplikasi Informatika		
1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 223.399.968
2.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp 370.567.800
3.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 223.174.400

Kegiatan		Anggaran	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
1.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp	140.000.000
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
1.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	105.657.200

Jayapura, 11 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA



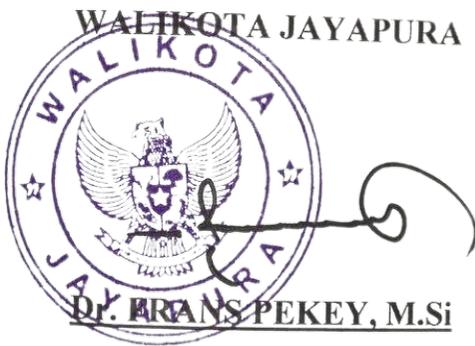
Drs. BINTON AINGGOLAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19650618 198903 1 018

Menyetujui,

WALIKOTA JAYAPURA



Dj. FRANS PEKEY, M.Si



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
(DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. BINTON NAINGGOLAN**
Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. FRANS PEKEY, M.Si**
Jabatan : **Pj. Walikota Jayapura**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

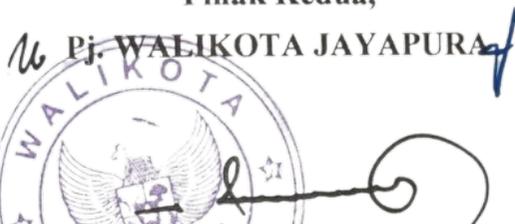
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 5 Oktober 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

Drs. BINTON NAINGGOLAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19650618 198903 1 018

Pihak Kedua,

Pj. WALIKOTA JAYAPURA


Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAYAPURA

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya tata kelola instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura	IKM	100%
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Terwujudnya E-Government yang terintegrasi	Presentasi Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi	100%
- Program Aplikasi Informatika		
Meningkatnya penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	100%
- Program Informasi Dan Komunikasi Publik		
Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai penunjang kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
Meningkatnya layanan pengamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	12 Bulan
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH)	30 Pasang
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang	5 Unit

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis	5 Jenis
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	5 Jenis
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksampler (Bulan)	12 Eksampler
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Orang	114 Orang/hari
	4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis layanan	6 Jenis
	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpeliharanya unit kendaraan operasional	5 Unit
	2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharanya sarana dan prasarana gedung / bangun kantor	1 gedung
2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah KIM dan PERTURA	50 KIM PERTURA
	2.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang berkompeten	5 Orang
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
	1.	Pegelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Astinet	12 Paket
	2.	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Jaringan Internet Government, Paket Zoom Meeting, Perawatan Videotron)	3 Layanan
	2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	60 Sumber Daya

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
	3.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Ruang Command Center	1 Ruang Command Center
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
	1.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kegiatan	1 Kegiatan
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Persandian yang Berkompeten	3 Orang

Kegiatan		Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.879.179.000
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 28.590.000
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 79.930.000
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 109.510.000
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 14.410.800
6.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.000.000
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp 130.199.200
8.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 212.715.000
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 10.357.000
10.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 6.488.000
Program Informasi Dan Komunikasi Publik		
1.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp 167.736.000
2.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 124.264.000
Program Aplikasi Informatika		
1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 223.399.968
2.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp 370.567.800
3.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 223.174.400

Kegiatan	Anggaran
4. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Rp 263.540.680
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 140.000.000
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 105.657.200

Jayapura, 5 Oktober 2023

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA



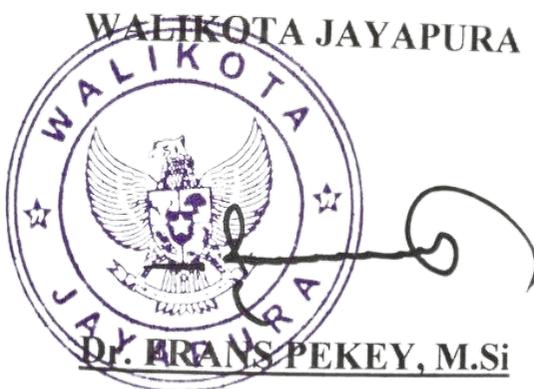
Drs. BINTON AINGGOLAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19650618 198903 1 018

Menyetujui,

WALIKOTA JAYAPURA



Dr. FRANS PEKEY, M.Si